



Civic Education Di Pesantren Sebagai Basis Pembentukan Kesadaran Kebangsaan

Alfisyah^{1✉}, Sapriya², Lumban Arofah³

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia^{1,2}

Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia³

E-mail : alfisyah@upi.edu¹, sapriya@upi.edu², lumban.arofah@ulm.ac.id³

Abstrak

Civic education merupakan pendidikan yang mencita-citakan terbentuknya warga Negara yang baik sehingga ia menjadi sebuah keharusan bagi setiap warga Negara tak terkecuali bagi lembaga pendidikan pesantren. Meskipun di pesantren tradisional tidak memiliki mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan secara khusus namun pesantren memiliki mekanisme tersendiri dalam menanamkan etika kebangsaan untuk menciptakan santri yang berakhlakul karimah sekaligus sebagai warga Negara yang baik. Artikel ini bertujuan untuk menelaah pendidikan kewarganegaraan di pesantren Darussalam Martapura. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara pada beberapa pengajar dan santri dari pesantren Darussalam untuk mendapatkan data tentang pengetahuan kewarganegaraan dan kebangsaan mereka. Studi literatur dengan memanfaatkan mesin pencarian melalui google scholar, pdf drive, dan e-perpusnas dilakukan untuk memaparkan pendidikan kewarganegaraan yang dijalankan pesantren tradisional. Berdasarkan paparan dari artikel naskah konseptual, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menciptakan warga Negara yang baik. Sementara pendidikan pesantren melalui berbagai tradisi yang dijalani telah menciptakan manusia dan masyarakat yang memiliki perilaku dan moral yang baik. Hal tersebut dibentuk diantaranya melalui tradisi yang dibangun di pesantren seperti pembelajaran dengan menggunakan kitab-kitab klasik serta metode bandongan yang telah membentuk santri menjadi warga Negara yang baik, mandiri, peduli, peka, toleran dan tanggung jawab.

Kata Kunci: pendidikan kewarganegaraan, kebangsaan, pesantren

Abstract

Civic education is education that aspires to the formation of good citizens. This is a must for every citizen, including Islamic boarding schools. Although traditional boarding schools do not have specific civic education subjects, they have their mechanism in instilling national ethics to create students who have good morals as well as good citizens. This article aimed to examine civic education at the Darussalam Islamic boarding school Martapura. The data were collected by conducting interviews with several teachers and students at the Darussalam Islamic boarding school to obtain data about their citizenship and nationality knowledge. The literature study was to use search engines through Google Scholar, pdf drive, and e-Library to describe civic education run by traditional Islamic boarding school. Based on the explanation of the conceptual manuscript article, civic education aimed to create good citizens. Furthermore, Islamic boarding school education through various traditions creates humans and people who have good behavior and morals. This is formed through traditions built in Islamic boarding schools such as learning by using classical books and bandongan method that has formed students to become good citizens, independent, caring, sensitive, tolerant, and responsible.

Keywords: civic education, nationalism, Islamic boarding school

Copyright (c) 2021 Alfisyah, Sapriya, Lumban Arofah

✉ Corresponding author:

Email : alfisyah@upi.edu

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i4.602>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

PENDAHULUAN

Belakangan ini, seiring dengan kembali mencuatnya isu radikalisme dan terorisme yang beberapa di antaranya bernuansa agama, maka komitmen kebangsaan pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan berbasis keagamaan kembali dipertanyakan. Sebagian orang mengaitkan kondisi ini dengan minimnya jiwa kebangsaan di kalangan pesantren. Nasionalisme dan kewarganegaraan pesantren kembali dipertanyakan bahkan sebagian mengaitkan dengan pendidikan kewarganegaraan di pesantren.

Pendidikan kewarganegaraan atau yang biasa dikenal juga dengan *civic(s) education* maupun *citizenship education* merupakan suatu pendidikan yang membentuk warga Negara yang baik yaitu warga Negara yang tahu dan mampu menjalankan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Citizenship Education berperan dalam mendidik warga Negara untuk menjadi warga negara yang baik dan untuk dapat melaksanakan fungsi dan perannya sebagai warga Negara yang baik maka seorang warga negara seharusnya memiliki pengetahuan dan keterampilan serta nilai nilai (*civic knowledge, civic skills, and civic values*) yang bisa didapatkan dari berbagai disiplin ilmu sosial yang dapat digunakannya secara baik guna memudahkannya dalam kehidupannya di masyarakat khususnya dalam mengambil keputusan dan dalam memecahkan masalah masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Beberapa di antara pengetahuan dan nilai nilai tersebut misalnya apa yang harus dilakukan oleh seorang warga jika hak-hak pribadinya dilanggar; apa pentingnya kartu identitas penduduk dan bagaimana cara memperolehnya; bagaimana cara membayar pajak dan apa saja jenis pajak yang harus dibayar oleh seorang warga Negara dan lain lain. Semua pengetahuan tersebut merupakan contoh dari berbagai teori yang dapat diperoleh dari civics atau ilmu kewarganegaraan (Wahab & Sapriya, 2011).

Beberapa ahli membedakan antara konsep *civics*, *civics education* dan *citizenship education*. *Civics* atau juga disebut ilmu kewarganegaraan menekankan pembahasannya pada aspek teoritik sementara *civic education* atau disebut dengan pendidikan kewarganegaraan lebih menekankan pada aspek praktek kewarganegaraan dan merupakan perluasan dari civics. Adapun *citizenship education* dibedakan dengan civics didasarkan pada cakupan dalam arti sempit dan luas. Menurut Gross and Zeleny (Wahab & Sapriya, 2011), *civics* lebih menekankan pada teori dan praktek sementara citizenship lebih menekankan pada keterlibatan dan partisipasi warga Negara dalam permasalahan-permasalahan kemasyarakatan.

Berkaca dari paparan di atas maka pendidikan kewarganegaraan menjadi suatu yang wajib bagi setiap warga Negara dan baik teori maupun praktek harus berjalan secara bersamaan. Pada kenyataan terkadang idealism itu tidak berjalan selaras. Ada warga Negara yang *civics* atau ilmu kewarganegaraannya matang yang ditandai dengan penguasaan teori-teori kewarganegaraan tetapi *civic education*nya atau praktek kewarganegaraannya buruk. Bahkan juga terkadang ditemukan seorang atau sekelompok warga Negara yang secara formal tidak memiliki atau mendapatkan ilmu kewarganegaraan dengan alasan institusi pendidikan yang dijalaninya tidak memuat mata pelajaran ilmu kewarganegaraan tetapi *citizenship education* nya bagus yang ditandai dengan keterlibatan dan partisipasi serta kemampuan menjalankan hak-hak dan kewajibannya yang baik.

Tidak semua lembaga pendidikan memiliki mata pelajaran ilmu kewarga-negaraan meskipun semua pendidikan pasti menghendaki terbentuknya peserta didik yang baik. Pendidikan menurut KI Hajar Dewantara merupakan daya upaya untuk kemajuan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*) dan tumbuhnya anak (Budimansyah, 2010). Salah satu lembaga pendidikan yang tidak memuat mata ajar pendidikan kewarganegaraan secara formal adalah pendidikan pesantren khususnya pesantren tradisional atau pesantren *salafiah*. Pesantren *salafiah* adalah lembaga pesantren yang mempertahankan kitab-kitab Islam klasik (*salaf*) sebagai inti pendidikan tanpa mengenalkan pembelajaran pengetahuan umum (Departemen Agama RI, 2003). Meskipun demikian dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, pesantren juga turut andil dalam proses perjuangan kemerdekaan dan bahkan beberapa tokoh pejuang memiliki latar belakang

pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki cinta tanah air yang tinggi sesuai yang menjadi tujuan pendidikan kewarganegaraan.

Melalui tradisi yang dibangunnya, pesantren telah berhasil menciptakan peserta didik yang memiliki moral tinggi, perilaku yang baik (*akhlak al-karimah*) dan rasa cinta tanah air yang besar. Tidak sedikit pemimpin bangsa khususnya dari angkatan 1945 adalah alumni atau setidaknya pernah belajar di pesantren (Mastuhu, 1994). Meskipun juga ada sebagian yang menganggap bahwa pesantren juga merupakan pusat pendidikan radikalisme dan anti nasionalisme. Hal ini didasari pada adanya beberapa pelaku teroris yang berlatar belakang pesantren. Bahkan Robert W. Hefner (2009) menyatakan bahwa: “Since the 9/11 attacks in the United State and the October 2002 Bali bombings in Indonesia, Islamic schools in Southeast Asia have been the focus of international attention”. Beberapa pesantren juga dituding sebagai wadah yang melahirkan bibit-bibit radikalisme. Hal ini menurut Sulasman (2015) disebabkan karena ‘keberislaman diri dan kelompok mereka adalah keberislaman yang paling benar, sementara yang lain dianggap memiliki kekurangan atau bahkan “salah”. Hal ini melahirkan sikap tertutup dan tidak mau menerima ideologi yang berbeda, bahkan siapapun yang melawan ideologi mereka sama dengan melawan Islam. Pandangan yang tidak simpatik terhadap pesantren ini bukan saat ini saja tetapi sudah berlangsung sejak masa kolonial. Belanda dengan misi imperialistiknya, menganggap pesantren sebagai ancaman bagi tujuan-tujuan kolonialisme. Belanda melakukan berbagai cara agar pesantren tidak berkembang. Salah satunya dengan memperkenalkan sistem pendidikan sekolah dan memperlakukannya sebagai anak emas dan membuat stigma serta asumsi asumsi negatif tentang pesantren (Jauhari, 2002).

Dengan memelihara sejumlah tradisi, ritual, praktek keagamaan serta seni dan budaya yang menghubungkan satu generasi ke generasi berikutnya, dari satu komunitas ke komunitas lainnya, pesantren telah mendorong terciptanya solidaritas berbangsa, persatuan dan kebersamaan di antara komponen bangsa. Selain itu, melalui tradisi penghargaan terhadap ulama, pendahulu ataupun leluhur yang memiliki jasa bagi agama, bangsa dan Negara, pesantren telah membantu anak bangsa memelihara segenap memori kolektif masa lalu tentang kejayaan, pengorbanan dan perjuangan menghadapi bangsa asing untuk mewujudkan kemerdekaan dan tanah air Indonesia (Baso, 2012).

Salah satu pesantren di Kalimantan Selatan yang dalam hal materi pembelajarannya masih masuk kategori *salafiyah* dengan menggunakan kitab klasik dalam pembelajarannya adalah Pondok Pesantren Darussalam Martapura khususnya pada unit madrasah diniyah. Madrasah diniyah pesantren Darussalam ini seluruh mata pelajaran yang diajarkan menggunakan kitab klasik sebagai referensi sehingga tidak ada materi umum dalam kurikulum pembelajaran mereka termasuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn). Meskipun tidak ada istilah khusus yang berorientasi pada pendidikan kewarganegaraan digunakan dalam materi pembelajaran di pesantren tetapi hampir tidak diragukan lagi pesantren memiliki pandangan yang kuat tentang kebangsaan. Pesantren secara umum juga dikenal sebagai lembaga yang mampu mencetak warga Negara yang baik dan memiliki moral yang tinggi. Keberhasilan pesantren dalam mendidik santrinya tersebut bukan suatu kebetulan tetapi ada nilai-nilai yang mendasarinya (Budiman & Ismatullah, 2015). Oleh karena itu menarik untuk dikaji bagaimana pendidikan kewarganegaraan yang dimiliki pesantren sekarang ini. Lebih khusus, melalui tulisan ini akan digali tentang eksistensi pendidikan kewarganegaraan di pesantren pada masa sekarang ini: apakah pesantren memiliki materi ajar dengan muatan kewarganegaraan dan melalui apa serta dengan cara apa masyarakat pesantren mendapatkan pengetahuan atau ilmu dan pendidikan kewarganegaraannya.

Kajian tentang peran pesantren dalam pembentukan sikap kebangsaan sudah pernah dikaji oleh Ahmad Baso (2012) yang mengkaji tentang tradisi penghargaan pada ulama dan leluhur yang telah membantu santri untuk memelihara segenap memori kolektif masa lalu tentang kejayaan, pengorbanan dan perjuangan menghadapi bangsa asing untuk mewujudkan kemerdekaan dan tanah air Indonesia. Hendri (2020) dalam tulisannya menemukan bahwa penguatan moral yang sesuai dengan nilai Pancasila di pesantren dilakukamn

melalui pendidikan formal, informal dan nonformal. Oleh sebab itu penelitian ini lebih memfokuskan pada pendidikan kewarganegaraan di pesantren modern maupun madrasah yang memang memiliki mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, sementara pesantren salafiyah yang tidak memiliki mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan secara khusus hampir belum ditemukan, padahal hal tersebut penting untuk membuktikan ataupun menyanggah tuduhan tentang radikalisme yang sering dikaitkan dengan pesantren salafiyah.

METODE PENELITIAN

Artikel ini bersifat deskriptif dengan uraian narasi terstruktur. Penulisan artikel ini juga menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus pada sebuah pondok pesantren tertua di Kalimantan Selatan yaitu Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan kajian literature. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling dengan mewawancarai kepada tujuh orang informan yang terdiri dari dua tenaga pengajar dan lima orang murid atau santri dari pondok pesantren Darussalam. Pengumpulan data dilakukan selama periode Maret-Mei 2021 di kota Martapura tempat dimana Pesantren Darussalam berada. Wawancara dilakukan baik di pesantren tempat dimana dilakukan proses belajar mengajar, maupun di rumah. Namun selama masa pandemi ini pengumpulan data dengan wawancara lebih banyak dilakukan di rumah. Hal ini disebabkan karena proses belajar mengajar di pesantren juga sangat terbatas (masuk secara bergantian berselang hari). Kegiatan observasi juga dilakukan di Pesantren Darussalam dengan membuat catatan-catatan penting terkait dengan aktifitas belajar mengajar mereka. Pengamatan juga hanya dilakukan pada proses belajar madrasah diniyah putri karena keterbatasan peneliti untuk mendapatkan akses pada madrasah diniyah putra terkait dengan etika setempat. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai observer non partisipan, dimana peneliti hanya mengamati tanpa terlibat dalam proses belajar mengajar di pesantren. Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian dan verifikasi data. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi baik sumber, waktu maupun tehnik.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Sekilas tentang Pesantren Darussalam

Pondok Pesantren Darussalam (selanjutnya disingkat PPD) Martapura merupakan pesantren tertua di Kalimantan Selatan yang berdiri pada 14 Juli 1914 dengan nama Madrasah Islam Darussalam. Lembaga pendidikan ini didirikan oleh H. Jamaluddin bersama beberapa tokoh, yaitu K.H. M. Tamrin, K.H. Hasan Gampal, K.H. Ibrahim Kadir, K.H. Abdurrahman, K. H. Hasan, serta K.H. Muhammad Ali (Elmahbub, 2013). Pesantren ini pada awal berdirinya merupakan lembaga pendidikan tradisional atau *salafiyah* yang hanya mengajarkan pengetahuan di bidang keagamaan dengan menggunakan kitab-kitab klasik atau dikenal dengan kitab kuning. Sistem pembelajaran dilakukan dengan metode *halaqah*, yaitu guru menyampaikan materi dengan cara ceramah dan murid duduk di sekelilingnya sambil mendengarkan materi. Pembelajaran dengan cara ini tidak mengenal sistem kelas dan juga tanpa batasan umur (Hidayati, 2017). Sistem ini juga tidak mengenal evaluasi pembelajaran layaknya sistem pendidikan modern.

Dalam perkembangannya PPD melakukan berbagai terobosan di antaranya dengan membuka dan menyelenggarakan pendidikan formal dengan sistem klasikal. Sistem ini diperkenalkan pada saat kepemimpinan K.H. Kasyful Anwar dari tahun 1922 hingga 1940. Saat ini PPD tidak hanya menyelenggarakan pendidikan Islam kepesantrenan dan madrasah tetapi juga memiliki unit pendidikan dengan sistem pendidikan nasional serta vokasi. Unit-unit pendidikan tersebut adalah madrasah diniyah (lebih populer dengan sebutan *madin*) Tahdiriyah, madin awwaliyah, madin wustha, madin ulya, madrasah ibtidaiah Darussalam, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Darussalam, Madrasah Aliyah Mu'alimin Darussalam, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darussalam, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam, Ma'had Tahfidz wa Ulumul Qur'an Darussalam, Program Kejar Paket A, B, C, serta Ukhuwah

Ma'ahid Darussalam (Elmahbub, 2013). Dari semua unit tersebut unit madin merupakan unit yang paling populer dan paling banyak diminati. Menurut data yang tertulis dalam Dokumen Pondok Pesantren Darussalam pada tahun ajaran 2013/2014 jumlah santri madin sebanyak 9977 jauh diatas unit unit lainnya yang hanya memiliki jumlah santri sebanyak 2733 santri. Sebagian masyarakat bahkan tidak begitu mengetahui tentang keberadaan unit-unit lain, sehingga ketika menyebut pesantren Darussalam maka orientasi yang dituju adalah unit madin tersebut.

Kajian ini dikhususkan untuk unit madin karena selain alasan di atas, unit madin juga merupakan unit yang paling orisinal dibanding unit lainnya. Unit ini selain penggunaan sistem klasikal pada pembelajarannya, hampir sepenuhnya mempertahankan pola pola tradisional menyerupai pesantren *salafi*. Materi dan referensi yang digunakan berupa kitab kitab klasik yang umum digunakan di pesantren *salafi*. Meskipun demikian PPD juga berbeda dari pesantren pada umumnya, meskipun menggunakan istilah pesantren untuk lembaga pendidikannya, PPD tidak sepenuhnya merepresentasikan tradisi pesantren yang dicirikan dengan unsur kyai, santri, asrama, masjid dan kitab klasik. PPD merupakan lembaga pendidikan dengan pembelajaran kitab klasik yang dilakukan oleh kyai -yang dalam istilah lokal disebut *tuan guru*-, namun tidak memiliki komplek asrama khusus maupun masjid seperti tradisi pesantren pada umumnya. Para santri meskipun juga banyak yang berasal dari luar kabupaten namun mereka tidak menempati asrama khusus dalam satu komplek. Pada umumnya santri-santri yang berasal dari wilayah yang jauh akan menyewa rumah atau sekedar *bedakan* (petak kamar) yang banyak tersedia di sekitar pesantren. Selain itu juga sebagian mereka menempati asrama asrama yang sengaja dibangun di sekitar pondok baik oleh salah satu *tuan guru* maupun oleh pemerintah daerah dari beberapa kabupaten di kawasan Kalimantan khususnya Kalimantan Selatan. Asrama-asrama ini hanya tersedia untuk santri laki-laki, sementara untuk santri perempuan tidak tersedia kecuali menyewa rumah atau *bedakan* saja.

Transmisi Kesadaran Kewarganegaraan dan Kebangsaan di Pesantren

Pendidikan memainkan peranan penting dalam pengembangan warga Negara yang salah satunya dengan mempraktekkan secara langsung demokrasi partisipatif serta mengembangkan budaya organisasi yang demokratis (Bírzéa, 2000). Hal tersebut akan dapat tercapai salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan. Menurut Sapriya dan Winataputra (2004) dalam paradigma barunya, pendidikan kewarganegaraan mengembangkan tiga fungsi pokok, yakni mengembangkan kekuatan kecerdasan warga Negara (*Civic Intelegence*), membina tanggung jawab warga Negara (*Civic Responsibility*) dan mendorong partisipasi warga Negara (*Civic Participation*). Di antara aspek penting yang perlu dilakukan reaktualisasi dalam kehidupan berbangsa berbangsa, yaitu memahami dan mentaati hakikat norma dan hukum, mengembangkan kemampuan sikap positif terhadap makna dan nilai-nilai proklamasi, kemampuan pada upaya perlindungan Hak Asasi Manusia, serta kemampuan kemerdekaan mengemukakan pendapat. Berkaitan dengan ketaatan pada norma dan hukum, maka semua masyarakat seharusnya tetap menjunjung tinggi nilai moral yang berlaku di msyarakat baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan serta nilai kesusilaan (Sundari & Dewi, 2021).

Dalam rangka pendidikan kewarganegaraan dan penanaman nilai-nilai kebangsaan, pesantren tradisional memiliki mekanisme dan tradisi tersendiri yang khas yang dimungkinkan dapat membentuk kecerdasan, membina tanggung jawab serta mendorong partisipasi sehingga dapat memahami serta mentaati hakikat norma dan hukum. Proses ini selain dilakukan melalui pembelajaran, baik muatan maupun metodenya, juga dilakukan melalui tradisi tradisi tertentu yang memang lekat dengan tradisi pesantren. Di Pondok pesantren Darussalam, pendidikan kewarganegaraan ditanamkan dan diajarkan melalui beberapa cara, diantaranya dengan memasukkan mata pelajaran Pkn pada kurikulum pembelajaran sebagaimana lembaga pendidikan modern pada umumnya namun ini hanya berlaku pada unit pesantren di luar madrasah diniyah. Sementara pada unit madrasah diniyah seperti yang akan menjadi focus objek kajian penelitian ini, tidak

memiliki mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan namun penanaman kesadaran kewarganegaraan dilakukan melalui cara-cara yang khas tradisi pesantren.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang “indigenous” Indonesia, pesantren memiliki peran yang besar dalam pendidikan dan pembentukan nilai moral di masyarakat. Pendidikan pesantren menurut Dzofier (1982) bertujuan “meninggikan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral, dan menyiapkan para murid untuk hidup sederhana dan bersih hati.” Melalui beberapa mata ajar dan materi pelajaran yang diajarkan, berbagai nilai moral ditransmisikan. Di madrasah diniyah Pondok Pesantren Darussalam nilai-nilai moral ditransmisikan melalui pada mata ajar akhlak, tarikh, hadits serta tafsir. Melalui mata pelajaran akhlak diajarkan tentang berbagai etika, perilaku dan nilai-nilai moral yang baik seperti ketaatan, kejujuran dan penghormatan. Sementara melalui mata ajar tarikh, santri dikenalkan berbagai sejarah Islam dan tokoh-tokohnya serta ditanamkan berbagai nilai-nilai moral yang melekat pada peristiwa dan tokoh-tokoh tersebut. Sementara dalam mata ajar hadis dan tafsir disampaikan berbagai doktrin agama termasuk ajaran yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia sebagai anggota masyarakat.

Meskipun pesantren secara umum memiliki tradisi yang sama namun dalam proses transformasi nilai dan muatan muatannya terkadang memiliki perbedaan. Hal itulah kemudian yang memunculkan citra dan pandangan yang berbeda tentang pesantren. Dalam konteks bangunan umat dan bangsa Indonesia, menurut Horikoshi (1987), setiap pesantren selalu memiliki ciri khas yang berbeda satu dengan lain, meskipun dampak yang dihasilkan kurang lebih sama. Di PPD sebagaimana pesantren *salafiyah* pada umumnya, penggunaan kitab klasik sebagai sebuah tradisi pembelajaran merupakan satu-satunya tradisi yang masih melekat dari sejak berdiri hingga sekarang. Demikian juga referensi kitab klasik yang digunakan juga tidak banyak mengalami perubahan dari sejak awal berdirinya.

Salah satu kekhasan yang ada dalam sistem pendidikan dan pembelajaran di pesantren adalah pembelajaran dengan metode *bandongan* dan *sorogan*. Menurut Mujamil Qomar (2007), metode *bandongan* merupakan hasil adaptasi dari metode pengajaran agama yang berlangsung di Timur Tengah khususnya di Mekkah dan Al Azhar Mesir. Kedua tempat ini menjadi inspirasi dan model dalam pelaksanaan metode *bandongan* disebabkan karena kedua tempat ini merupakan poros keilmuan kalangan pesantren sejak awal pertumbuhan hingga sekarang. Di Pondok Pesantren Darussalam ini sistem pembelajaran yang digunakan adalah sistem *bandongan*, meskipun penyebutan ini sesungguhnya hampir tidak dikenal di kalangan masyarakat lokal. Pada prakteknya sistem pengajaran yang digunakan memang hampir menyerupai sistem *bandongan*, dimana kyai membacakan kitab kemudian memberikan terjemahan disertai dengan penjelasannya, sementara para santri mendengarkan sambil memberi keterangan pada kitab yang mereka pelajari tersebut. Pembelajaran seperti ini telah membentuk watak santri Darussalam menjadi sabar, disiplin dan taat. Hal ini juga diungkapkan oleh para pengajar atau ustadz Darussalam bahwa dengan cara demikian santri akan menjadi sabar dan disiplin karena pembelajaran ini membutuhkan kesabaran dan ketaatan. Metode pembelajaran *bandongan* dan *sorogan* memiliki beberapa kelemahan. Menurut Dhofier (1982), banyak murid pengajian di pedesaan gagal dalam pendidikan dengan metode ini karena dari keseluruhan sistem pendidikan tradisional maka metode ini dipandang yang paling sulit. Hal ini disebabkan karena metode ini menuntut kesabaran, ketaatan, kerajinan dan disiplin pribadi dari santri. Dengan kata lain metode pembelajaran *bandongan* dan *sorogan* yang digunakan dalam proses pembelajaran di pesantren ini telah membentuk watak dan etika santri atau warga belajar untuk selalu sabar, taat, rajin serta disiplin. Metode yang tidak hanya sekedar sebuah cara untuk mentransformasikan pengetahuan, tetapi ia juga sekaligus membentuk watak dan sikap (afektif) dari warga belajar.

Pondok Pesantren Darussalam sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang berorientasi pada pengajaran kitab kuning, maka hampir seluruh mata pelajaran yang diajarkan menggunakan kitab klasik sebagai literatur pembelajaran. Sebagaimana lembaga pendidikan lain yang juga menggunakan kitab klasik

maka materi-materi ajar juga hampir sama yaitu meliputi *fikih, tauhid, ushul fikih, ushul tafsir, ushul hadis, tarikh, faraid, insya', shorof, nahwu, mantiq, balagh, tafsir, hadis, akhlak*. Semua materi ajar tersebut menggunakan kitab-kitab klasik. Khazanah klasik yang digunakan pesantren dalam sistem pembelajara ini menurut Said Agil Siradj (2007), telah melahirkan sikap yang *tasamuh, tawazun* dan *i'tidal* yang dapat membentengi dari sikap ekstrem atau pun radikal. Pesantren dengan *fiqh oriented*, berkarakter *tawasuth* (tidak memihak), *tawazun* (menjaga keseimbangan dan harmoni), *tasammuh* (toleransi) dan *tasyawwur* (musyawarah), berupaya menampilkan sikap akomodatif yang seimbang dengan budaya setempat membuat pesantren jauh dari sikap dan praktek ekstrimis (Noorhayati, 2017). Pesantren Darussalam merupakan satu contoh pesantren dengan *fiqh oriented* yang oleh karenanya juga sangat akomodatif terhadap budaya dan tradisi lokal Banjar yang oleh karenanya hingga saat ini tidak pernah ditemukan santri maupun warga masyarakat

Nilai dan praktek yang dijalankan di pesantren tersebut bersesuaian dengan karakteristik kewarganegaraan demokratis seperti yang dikemukakan oleh Cogan dan Derricott (1998), yaitu memiliki kepekaan sosial dan mempertahankan Hak-Asasi Manusia serta mampu menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan. Pesantren tidak pernah memulai konfrontasi karena orientasi utamanya adalah melancarkan dakwah dan menanamkan pendidikan. Hal ini membuat pesantren dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat sebagai upaya mencerdaskan dan meningkatkan kedamaian (Noorhayati, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa Pondok Pesantren Darussalam pada unit madrasah diniyah tidak memiliki mata pelajaran dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan. Seluruh mata pelajaran yang diajarkan adalah mata pelajaran dengan istilah-istilah umum yang digunakan pada pesantren salafiyah, yaitu mata ajar dengan menggunakan istilah-istilah bahasa Arab. Demikian juga literatur-literatur yang digunakan semuanya juga menggunakan kitab-kitab klasik sebagai buku pegangan pembelajaran. Namun meskipun pesantren tidak memiliki mata ajar pendidikan kewarganegaraan namun nilai-nilai kewarganegaraan dan kebangsaan tetap dimiliki oleh masyarakat pesantren. Adapun cara yang dilakukan oleh pesantren untuk menanamkan kesadaran kewarganegaraan dan kebangsaan santri adalah melalui tradisi-tradisi yang dijalankan oleh pesantren, yaitu tradisi penggunaan kitab klasik dan metode pembelajaran *bandongan*. Tradisi yang dikembangkan di pesantren telah membentuk karakter santri atau peserta didik hingga menghasilkan warga masyarakat yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Penggunaan kitab klasik sebagai ciri khas pesantren berkontribusi bagi pembentukan dan pembinaan perilaku dan tanggungjawab yang juga merupakan fungsi dari pendidikan kewarganegaraan. Pilihan-pilihan kitab klasik yang digunakan telah melahirkan sikap-sikap yang sejalan dengan nilai demokrasi. Demikian juga metode pembelajaran yang dilaksanakan sebagai bagian dari tradisi pesantren juga telah memberi andil bagi pembentukan watak dan etika santri yang sabar, ulet, disiplin dan patuh sesuai dengan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan untuk menjadi warga Negara yang baik. Maka dari itu Pesantren Darussalam harus dapat terus menumbuhkan semangat kebangsaan kepada santri agar santri juga tidak mudah disusupi oleh pandangan-pandangan ekstrimis yang dapat merusak jiwa kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Untuk hal itu Pesantren Darussalam diharapkan dapat terus mempertahankan tradisi dan metode-metode pembelajaran tersebut sambil terus menanamkan berbagai nilai moral yang baik melalui pengajaran tersebut. Hal ini tentu agak berbeda dengan pandangan sebagian orang selama ini yang mengaitkan pesantren *salafiyah* dengan pendidikan radikalisme yang harus dimodernisasi, diperbaharui dan disadarkan. Meskipun demikian penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji dari sisi tradisi penggunaan literature dan metode pembelajaran, tentu saja masih banyak aspek lain yang dapat diteliti untuk melihat pembentukan kesadaran kebangsaan di kalangan masyarakat pesantren. Selain itu keterbatasan waktu penelitian yang hanya dilakukan 3 bulan memungkinkan kurangnya pengungkapan kondisi yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan atas pendidikan kewarganegaraan di Pesantren Darussalam, dapat disimpulkan bahwa eksistensi pendidikan kewarganegaraan di pesantren ini tidak lah melalui mata pelajaran PKn & Pesantren Darussalam unit madrasah diniyah tidak memiliki mata pelajaran tersebut. *Civic education* di Pesantren Darussalam dilakukan melalui tradisi penggunaan khazanah klasik dan pembelajaran pesantren menggunakan metode *bandongan*. Melalui kedua cara ini identitas, etika dan semangat kebangsaan santri atau peserta didik ditanamkan. Santri terlatih untuk menjadi warga Negara yang baik, sabar, taat, disiplin, mandiri, peduli, peka, toleran dan tanggung jawab. Pembentukan kesadaran kebangsaan santri juga terasah melalui tradisi pendidikan yang berbasis pada khazanah kitab klasik yang sekaligus menjadi pendidikan deradikalisasi santri, sehingga dapat menciptakan warga Negara yang lebih toleran dan tidak berpikiran sempit.

Oleh karena itu guna menumbuhkan serta mengembangkan sikap kewarganegaraan yang baik dan kesadaran kebangsaan yang tinggi disarankan untuk dapat menggunakan cara-cara dan tradisi tertentu dalam pembelajaran yang dapat menjadi sebuah kebiasaan dan membentuk watak di kalangan peserta didik. Cara itu di antara nya adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang dapat menumbuhkan sikap sabar, taat, disiplin serta mandiri. Selain itu pembiasaan atas tradisi tertentu yang dapat menciptakan sikap toleran dan demokratis juga perlu dilakukan, bahkan bisa jadi pendidikan kewarganegaraan bisa dilakukan dengan melakukan studi banding & mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan di pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Baso, A. (2012). Akar Pendidikan Kewarganegaraan di Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati*, 27(2).
- Bîrzéa, C. (2000). Education for Democratic Citizenship: A Lifelong Learning Perspective. *Project PROJECT ON "EDUCATION FOR DEMOCRATIC CITIZENSHIP,"* 21(June), 1–88.
- Budiman, A., & Ismatullah, F. (2015). Penerapan Pendidikan Akhlak di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darut Taqwa Jenengan Ponorogo. *At-Ta'dib*, 10(1).
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*. Widya Aksara Press.
- Cogan, J. J., & Derricott, R. (1998). *Citizenship for The 21st Century: An International Perspective on Education*. Kogan Page.
- Departemen Agama RI. (2003). *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*. Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam.
- Dhofier, Z. (1982). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. LP3ES.
- Elmahbub. (2013). *Sejarah Singkat PP Darussalam*. 29 Maret.
<http://www.pp-darussalam.com/2013/03/sejarah-singkat-ppdarussalam-martapura.html>
- Hefner, R. W. (2009). *Making Modern Muslim: The Politics of Islamic education in Southeast Asia*. University of Hawaii Press.
- Hendri, H. (2020). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Pendidikan Pesantren dalam Membentuk Keadaban Moral Santri. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 35. <https://doi.org/10.24114/jk.v17i1.18702>
- Hidayati, N. (2017). Pemertahanan Kekhasan Pengajaran Kitab Kuning pada Pondok Pesantren Darussalam Martapura Kalimantan Selatan (Telaah Aspek Linguistik dan Sociolinguistik). *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 21(1).
- Horikoshi, H. (1987). *Kyai dan Perubahan Sosial*. P3M.
- Jauhari, M. I. (2002). *Sistem Pendidikan Pesantren: Mungkinkah menjadi Sistem Pendidikan Nasional*

- 1542 *Civic Education Di Pesantren Sebagai Basis Pembentukan Kesadaran Kebangsaan – Alfisyah, Sapriya, Lumban Arofah*
DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i4.602>
- Alternatif*. Penerbit Mutiara Al-Amien Printing.
- Mastuhu. (1994). *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren. Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Inis.
- Noorhayati, S. M. (2017). Pendidikan Multikultural di Pesantren (Upaya Membendung Radikalisme di Indonesia). *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 21(1), 67. <https://doi.org/10.29300/madania.v21i1.212>
- Qomar, M. (2007). *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Erlangga.
- Sapriya, & Winataputra, U. S. (2004). *Pendidikan Kewarganegaraan: Model Pengembangan dan Pembelajaran*. Laboratorium Pkn UPI Press.
- Siradj, S. A. (2007). Teks Pesantren Tentang Pendidikan Kebangsaan. In *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (Vol. 5, Issue 2). <https://doi.org/10.32729/edukasi.v5i2.180>
- Sulasman. (2015). Peaceful Jihad dan Pendidikan Derakadikalisasi Agama. *Walisongo*, 23(1), 151–176.
- Sundari, A., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan : Reaktualisasi Kapabilitas Berbangsa dan Bernegara Pada Siswa Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 523–528. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.381>
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Penerbit Alfabeta.